

DIPLOMASI NAHDLATUL ULAMA DALAM MENANGANI KONFLIK ANTARA PEMERINTAH THAILAND DENGAN MUSLIM PATANI

Tom Finaldin¹, Muhammad Rifki Ihwannudin²

Program Studi Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Ghfari
Bandung Email: finaldintom@gmail.com,
rifkyihwannudin@gmail.com

Abstract

Thailand is a country that has religious and cultural diversity. Buddhism is the majority religion in this white elephant country, and Islam is a minority religion. as is the case in countries that have minorities in general. Muslims in the Patani region also experience extraordinary discrimination, ranging from ethnicity, race and religion, which also occurs in the southern region of Thailand. The Thai government is trying to assimilate Muslim culture, resulting in many victims in this long conflict. In dealing with the conflict, the Thai government asked for mediation assistance from third parties from various countries and organizations, one of which was Nahdlatul Ulama. The research method used by researchers is a qualitative research method. Data is collected through literature studies originating from various sources, especially books and scientific research journals on related topics, then analyzing it using theory/perspective. Based on the results of the research and discussions carried out, it can be concluded that the diplomacy carried out by Nahdlatul Ulama to help resolve the conflict has not been completely successful because there are several obstacles that have prevented peace from occurring.

Keywords: *Conflict, Thai Government, Patani Muslims, Nahdlatul Ulama*

Abstrak

Thailand adalah sebuah negara yang memiliki keberagaman agama dan budaya. agama budha merupakan agama mayoritas di negeri gajah putih ini, dan agama islam merupakan salah satu agama minoritas. seperti halnya di negara-negara yang mempunyai kaum minoritas pada umumnya. muslim diwilayah Patani inipun juga mengalami diskriminasi yang luar biasa kesenjangan mulai dari suku, ras dan agama pun terjadi di wilayah Thailand selatan. pemerintah Thailand berupaya mengasimilasi kebudayaan muslim terjadi terdapat banyak korban dalam konflik yang berkepanjangn ini. dalam menghadapi konflik pemerintah Thailand meminta bantuan mediasi kepada pihak ketiga dari berbagai negara dan organisasi salah satunya yakni Nahdlatul Ulama. Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui studi literatur yang berasal dari berbagai sumber terutama buku dan jurnal penelitian ilmiah mengenai topik terkait kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori/perspektif. Berdasarkan hasil penelitian dan bahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan diplomasi yang dilakukan Nahdlatul Ulama untuk membantu menyelesaikan konflik belum sepenuhnya berhasil dikarenakan ada beberapa hambatan yang membuat perdamian belum terjadi.

Kata kunci: *Konflik, Pemerintah Thailand, Muslim Patani, Nahdlatul Ulama*

Pendahuluan

Thailand merupakan sebuah negara yang berada di antara negara-negara kawasan di asia tenggara yang merupakan kewasan antara benua Australia dan daratan China. Letak geografis Thailand yang berada di tengah-tengah ASEAN ini membuat cukup banyaknya kebudayaan serta agama yang masuk kedalam negara berbentuk kerajaan ini. Hampir 95% penduduk Thailand adalah beragama Budha dan sisanya yakni 5% termasuk yang menganut agama lain-lain. (Reachtoteachrecruiting.com, 2022) Dan agama islam termasuk agama kedua terbanyak yang berada di Thailand dengan jumlah sekitar 4,29% (Ramadhan, 2021), islam menjadi agama minoritas di negeri gajah putih ini. Umumnya penduduk Thailand yang beragama islam berada di wilayah Thailand selatan yang berbatasan dengan Malaysia, provinsi patani merupakan wilayah yang berada di Thailand selatan, dan mayoritas penduduknya beragama islam dengan etnis melayu (80%). Masuknya agama islam juga merupakan sebuah proses panjang. Dalam sejarahnya masyarakat dari Thailand selatan memiliki berbagai perbedaan etnis, suku dan budaya. Dikarenakan mayarakat Thailand merupakan keturunan etnis indocina yaitu bangsa siam atau biasa disebut dengan suku thai, sedangkan masyarakat patani yang berada di Thailand selatan ini merupakan etnis yang termasuk ke dalam rumpun melayu. Sejarah mencatat bahwa daerah patani dulunya bukanlah bagian dari wilayah negara Thailand dan merupakan sebuah kerajaan tersendiri dimana pada abad ke-14 sampai dengan abad ke-18 ini merupakan kerajaan yang merdeka, namun sejak akhir abad ke-18 kerajaan ini di taklukan raja siam/thai. (KHAIRI, 2017)

Seperti halnya di negara-negara yang mempunyai kaum minoritas pada umumnya. Muslim di wilayah patani ini pun juga mengalami diskriminasi yang luar biasa kesenjangan mulai dari suku, ras dan agama pun terjadi di wilayah Thailand selatan, terlebih lagi saat Thailand selatan ini berada dibawah kekuasaan pemerintahan Thailand, pada tahun 1902 saat kerajaan melayu telah di hapuskan. akibat dari jatuhnya Thailand Selatan ke tangan pemerintah Thailand yang menyebabkan Thailand selatan memiliki otoritas dan kewenangan sendiri untuk mengatur wilayah selatan, kini semua wewenang itu dipegang pemerintah Thailand secara penuh.(Sari, 2019)

Salah satu produk kebijakan pemerintah Thailand yang kurang mendapat penerimaan positif di kalangan masyarakat Patani adalah kebijakan "*Pan-Thai*". Di bawah kebijakan

ini, pemerintah Thailand mencoba melakukan upaya asimilasi yang terkesan dipaksakan terhadap warga Patani. Kebijakan *Pan-Thai* bertujuan membawa warga masyarakat Patani sebagai bagian integral dari masyarakat Thai yang mayoritas beragama Buddha. Kebijakan asimilasi ini menuai reaksi keras dan perlawanan dari masyarakat Patani. Aksi perlawanan tersebut dipicu oleh kecemasan dan kegelisahan atas kebijakan *Pan-Thai* yang dipandang sarat muatan dekulturasi atas kehidupan tradisi masyarakat Patani yang secara etnis dan keyakinan agama berbeda dari mayoritas masyarakat Thai.

Karena itu, kebijakan *Pan-Thai* yang mulai diberlakukan pada 1902 tersebut sangat ditentang oleh kalangan pemuka agama Islam. Ketakutan warga masyarakat muslim terhadap ancaman dekulturasi juga dipicu oleh penerapan "*Compulsory Primary Education Act*" pada 1921 yang mewajibkan anak-anak di wilayah Patani untuk mengikuti program belajar 4 (empat) tahun di sekolah negeri untuk belajar bahasa Thai dan Etika Buddha.

Penolakan warga masyarakat setempat terhadap kewajiban membayar pajak bumi kepada penguasa siam. Penolakan membayar pajak bumi tersebut dipicu oleh penerapan reformasi pendidikan oleh pemerintah siam tahun 1921 yang diketahui dengan sebutan *the 1921 compulsory Primary Education Art*. Bagi kalangan pondok pesantren di wilayah patani, pemberlakuan Undang-Undang wajib belajar tahun 1921 tersebut dipandang sebagai upaya sistematis penguasa Siam untuk memarginalisasi atau bahkan mengganti sistem pendidikan pesantren. Kebijakan demikian juga berimplikasi terhadap kelangsungan legitimasi dan kemapanan ekonomi para pemimpin pondok pesantren yang dikenal dengan panggilan tok guru melakukan upaya mobilisasi massa untuk menentang kebijakan reformasi pendidikan yang bertujuan mentransformasi jati diri warga masyarakat Melayu muslim Patani menjadi muslim thai. Salah satu bentuk perlawanan masyarakat melayu muslim patani adalah melalui aksi pembangkangan social, antara lain menolak membayar pajak kepada pemerintah siam dan menolak memasukkan anak-anak mereka ke sekolah negeri setempat.

Berdasarkan fakta sejarah, kebijakan *Pan-Thai* telah memicu konfrontasi khususnya antara pemerintah Thailand dan warga masyarakat muslim Patani. Konflik besar yang menyita perhatian dunia yakni peristiwa penyerangan masjid Krue-se dan insiden Tak bai

pada tahun 2004. peristiwa penyerangan terhadap masjid Krue-Se terjadi karena buntut dari peristiwa penyerangan terhadap 11 fasilitas kepolisian di Narathiwat, pattani, dan Yala. yang menewaskan 100 milisi separatis pelaku penyerangan. 30 milisi separatis lainnya melarikan diri dan bersembunyi di lingkungan masjid Krue-Se dan aparat keamanan Thailand mengepung masjid tersebut, tanpa disertai upaya negosiasi dalam penyerangan tersebut berujung baku tembak dan penerjunan lima satuan pasukan khusus Thailand kedalam lingkungan masjid. Sebanyak 31 militan berhasil ditembak mati. aksi penyerangan terhadap masjid Krue-Se memicu semangat jihad di kalangan masyarakat muslim patani khususnya anggota milisi bersenjata di Thailand Selatan. mereka melakukan serangan balasan terhadap pos-pos keamanan (*check point*) di daerah-daerah pedesaan, kantor polisi, dan markas militer.

Peristiwa lainnya yakni tragedi unjuk rasa di Tak-bai di Narathiwat. aksi unjuk rasa ini bertempat di depan kantor polisi dalam bentuk protes penahanan enam anggota relawan pertahanan desa yang dituduh memberikan senjata api mereka kepada para militant setempat. Aksi unjuk rasa melibatkan sekitar 1500 orang, dimana peristiwa ini berujung pembubaran paksa dan sekitar 1300 pengunjuk rasa di tangkap dan di bawa ke markas angkatan darat. Sebanyak 78 pengunjuk rasa dilaporan tewas akibat kesulitan bernafas selama berada di dalam truk. Sebagian pengunjuk rasa juga mengalami patah tulang akibat di tendangi dan dipukuli tentara Thailand. Dengan banyaknya peristiwa yang terjadi akibat konflik dengan muslim patani yang berkepanjangan pemerintah Thailand pun tidak berlarut-larut dalam masalah ini serta meminta pihak ketiga dari berbagai elemen untuk membantu mencari solusi di antaranya meminta dan mengundang PBNU dalam ikut serta memediasi sebagai pihak ketiga ke Thailand selatan.

Kiprah santri didunia diplomasi hadir melalui jalur diplomasi yakni perdamaian pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yakni dalam memenuhi keinginan pemerintah Thailand di bawah perdana menteri Thaksin Shinawatra untuk memediasi proses penyelesaian konflik antara pemerintah dengan masyarakat muslim Patani di Thailand selatan. Dalam kunjungan pertamanya pada tahun 2005 sebagai misi diplomasi Nahdlatul Ulama mengirim sebuah delegasi di bawah pimpinan Dr. (HC) K.H. A. Hasyim Muzadi ke Thailand dimana pemerintahan Thailand pada saat itu meminta saran kepada Nahdlatul Ulama sebagai

Organisasi Islam terbesar di Indonesia dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

Pertimbangan serta pemikiran strategi pemerintahan Thailand dalam konteks ini adalah keberadaan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masa islam yang berhaluan moderat serta memiliki pengikut dan pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. disamping itu, secara kultur dan tradisi keagamaan, pemerintah Thailand juga mencatat adanya persamaan budaya dan tradisi antara masyarakat melayu muslim di Thailand selatan dengan praktik keagamaan Nahdlatul Ulama. pada abad 21 tepatnya pada tahun 2005 dan 2006, menurut buku “Diplomasi Santri” menyebutkan bahwa kaum ulama pesantren yang di representasikan oleh Nahdlatul Ulama juga mendapatkan kesempatan untuk membantu penyelesaian konflik pattani di Thailand selatan. Misi diplomasi warga negara (*Citizen Diplomasi*) ala Nahdlatul Ulama ini telah semakin melengkapi misi mulia dalam membantu perdamaian dan ketertiban dunia yang melibatkan lembaga-lembaga organisasi islam Indonesia yang lain, termasuk diantaranya Muhammadiyah

Dimana kunjungan tersebut merupakan sebuah kunjungan resmi dalam rangka diplomasi untuk memediasi penyelesaian konflik di Thailand selatan dengan cara berkomunikasi interaktif antar mediator dalam hal ini yakni pemerintahan Thailand dengan masyarakat muslim Patani. Misi diplomasi Nahdlatul Ulama di Thailand selatan berlangsung sangat baik dan mendapat sambutan sangat positif baik dari pemerintahan Thailand maupun masyarakat muslim Patani. Namun komunikasi tersebut belum menemukan kedua belah pihak yang berkonflik melainkan hanya bertemu dengan salah satu pihak, dan mendengarkan pandangan serta kepentingan dari keduannya untuk menemukan akar permasalahan dari konflik tersebut secara nyata dengan fakta-fakta yang terjadi di wilayah Thailand selatan ini. dan Nahdlatul Ulama pun telah memberikan masukan serta pandangannya kepada pemerintahan Thailand yakni dengan pendekatan *Ahlussunah wal jama'ah* (ASWAJA). Dan juga Nahdlatul Ulama telah menekankan beberapa poin resolusi kepada pemerintahan Thailand seperti PM Thaksin, Raja Bhummibol, kepada putra mahkota, kepada jendal Sirichai Tunyasiri dan Komandan pemulihan keamanan dan perdamaian Thailand Selatan.

Tinjauan Teoritis

Dalam pelaksanaan politik luar negeri, diplomasi multijalur berakibat munculnya elemen fundamental untuk menipiskan sekat tebal yang semula memisahkan aktor internasional dan aktor domestik dalam mengelola diplomasi. Diplomasi multi jalur kerap melibatkan sejumlah unsur aktor dalam masyarakat, yaitu pemerintah pada jalur utama, dan pada jalur kedua terdapat LSM (NGO), kalangan profesional, kelompok agama, kelompok bisnis, aktivis advokasi, aktivis penelitian, pelatihan, pendidikan, organisasi penyedia dana, media massa, dan warga negara biasa. *Track one diplomacy* adalah diplomasi yang dilakukan oleh aktor negara yakni pemerintah (government-to-government) dan merupakan elemen penting dalam diplomasi. *Track one diplomacy* dilakukan dengan mempertimbangkan aspek formal dalam proses pemerintahan karena dilakukan oleh kepala negara ataupun diplomat professional serta wakil-wakil yang telah diberi instruksi oleh negara yang berdaulat melalui negoisasi, mediasi, intervensi dan resolusi konflik.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui studi literatur yang berasal dari berbagai sumber terutama buku dan jurnal penelitian ilmiah mengenai topik terkait kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori/perspektif. Dengan demikian data yang berhasil dikumpulkan dapat dipahami secara lengkap dan menyeluruh. Sesuai dengan masalah pada penelitian ini yang akan menyoroti terkait masalah hubungan organisasi Islam suatu negara dengan negara lainnya. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia, maka peneliti melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan oleh situs resmi PBNU, kemudian diterapkan dengan teori-teori dalam kajian Hubungan Internasional.

Hasil dan Pembahasan

Masalah konflik Thailand selatan sejauh ini telah menjadi perhatian serius, tidak hanyadari pemeritntah Thailand sendiri namun juga dari kalangan dunia internasional Pasang Surut intesitas konflik di wilayah ini pada hakikatnya masih diwarnai nuansa konflik berbasis warisan sejarah masa lalu. Ragam argument yang menyoroti permasalahan konflik berkepanjangan di wilayah Thailand Selatan terus bermunculan belakangan ini, khususnya di kalangan pemerhati isu patani. Bagi pemerintah Thailand, penggabungan wilayah Patani

yang berpenduduk Melayu muslim sebagai bagian integral dari negara Thailand yang menganut paham Buddhisme (*Buddhism*) kiranya dapat dipandang sebagai sebuah "dilema" tersendiri. Situasi dilematis dalam konteks ini terefleksi jelas dari benturan kepentingan antara kebijakan asimilasi untuk menjadikan warga Patani yang Melayu muslim sebagai bagian integral bangsa Thai di satu pihak dan aksi perlawanan masyarakat Patani terhadap kebijakan dimaksud dalam rangka menjaga kelangsungan struktur dan nilai-nilai tradisi dan budaya setempat dari tindakan penghancuran di lain pihak. Berbagai kebijakan pemerintah Thailand yang bertujuan untuk mengasimilasi Muslim Patani menjadi masyarakat berbangsa "THAI" yang sesungguhnya kurang mendapatkan penerimaan yang positif di kalangan masyarakat patani. Berbagai kebijakan tersebut antara lain, Kebijakan "*Pan-Thai*" pada tahun 1902. Kebijakan tersebut memaksa nilai-nilai Budha masuk kedalam kehidupan masyarakat melayu, dengan pemberlakuan budaya Thai yang tanpa kompensasi atau toleransi sedikit pun. Pegawai pemerintahan diharuskan menggunakan nama-nama Thai. Terkait budaya Islam, pemerintah Thailand melarang penggunaan symbol-simbol Islam di tempat-tempat umum, termasuk larangan menggunakan patung-patung Budha ditempatkan di sekolah-sekolah publik, termasuk larangan menggunakan pakaian muslim. Selanjutnya ada penerapan kebijakan "*compulsory Primary education*" pada tahun 1921. kebijakan "*compulsory Primary education*" ini mewajibkan anak-anak di wilayah Patani untuk mengikuti program belajar 4 (empat) tahun disekolah negeri untuk belajar Bahasa Thai dan Etika Budhda.

Pada 28 april 2004 terjadi peristiwa penyerangan terhadap masjid Krue-Se, dimana peristiwa ini merupakan buntut dari kejadian penyerangan terhadap 11 fasilitas kepolisian di Narathiwat, Pattani, dan Yala yang menewaskan 100 anggota milisi separatis pelaku penyerangan. sekitar 30 milisi separatis lainnya melarikan diri dengan bersembunyi di lingkungan kompleks masjid Krue-Se yang bersejarah itu. Aparat keamanan Thailand kemudian mengepung masjid tersebut dengan menggunakan bom asap, gas air mata, dan granat. Dengan pengeras suara aparat keamanan menginstruksikan para milisi untuk keluar dari masjid dan menyerahkan diri, namun tanpa melakukan upaya negosiasi sebagaimana yang lazim dilakukan dalam sebuah misi penyergapan. Misi pengepungan tersebut berujung kepada aksi baku tembak yang disusul dengan penerjunan lima tim satuan khusus

Thailand kedalam masjid tersebut. sebanyak 31 militan berhasil di tembak mati. Kejadian tersebut memicu semangat jihad dikalangan muslim patani khususnya anggota bersenjata, dengan melakukan serangan balasan pada pos-pos keamanan, kantor polisi, dan markas militer setempat. Serta dalam waktu yang tidak berselang lama pada 25 oktober 2004 terdapat konflik di Tak Bai yang berada di Narathiwat bagian selatan. Peristiwa tersebut diawali dengan adanya aksi unjuk rasa di depan kantor polisi Tak Bai yang berjumlah 1.500 orang dengan tujuan memprotes penahanan enam anggota relawan pertahanan desa yang dituduh menyuplai senjata kepada para militant setempat. Aksi unjuk rasa itu pun berakhir dengan pembubaran secara paksa oleh pihak aparat kemanan dan dibalas dengan lemparan batu dan botol kearah polisi dan tentara yang bertugas. sekitar 1.300 pengunjuk rasa ditankap dan dimasukan ke dalam truk tentara dan dibawa ke markas angkatan darat di Inkayuth, Pattani yang berjarak sekitar 150 km. Setibanya di Pattani, sebanyak 78 pengunjuk rasa dilaporkan tewas akibat kesulitan bernafas selama berada di dalam truk. Sebagian pengunjuk rasa juga mengalami patah tulang akibat ditendangi dan dipukuli tentara Thailand. peristiwa penangkapan para pengunjuk rasa yang berakhir tragis tersebut memicu maraknya aksi kekerasan di wilayah thailand selatan. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Thailand mendapatkan penolakan disertakan perlawanan yang dilakukan berbagai pihak dari Muslim patani antara lain melalui pembangkangan sosial seperti menolak membayar pajak kepada pemerintah siam (Thailand) dan menolak memasukkan anak-anak mereka kesekolah negeri setempat.

Diplomasi Nahdlatul Ulama Dalam Menangani Konflik Di Thailand Selatan

Diplomasi perdamaian Nahdlatul Ulama melalui kunjungan delegasi pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ke Thailand adalah atas restu resmi pemerintah Thailand. Kunjungan delegasi Nahdlatul Ulama ke Thailand berlangsung pada tahun 2005 dengan dipimpin langsung oleh Ketua PBNU K.H. A Hasyim Muzadi. Kunjungan ini untuk membantu memediasi konflik Patani di Thailand Selatan. Kunjungan delegasi Nahdlatul Ulama ke Thailand dalam rangka misi diplomasi perdamaian berlangsung sebanyak dua kali. Kunungan pertama pada 27 Maret-1 April 2005 dan kunjungan ke- dua pada 11-12 September 2006. Kunjungan delegasi Nahdlatul Ulama yang berlangsung pada 27 Maret-1 April 2005 merupakan kunjungan resmi dalam rangka memediasi konflik berkepanjangan di

wilayah Patani, Thailand Selatan. Karena kunjungan bersifat misi mediasi, maka kegiatan kunjungan diisi serangkaian pertemuan dengan kalangan elite pemimpin nasional Thailand dan representasi Melayu muslim Patani.

Di samping pertemuan dengan kalangan pejabat teras pemerintah Thailand di Bangkok, delegasi Nahdlatul Ulama juga melakukan kunjungan ke Provinsi Pattani di Thailand Selatan yang merupakan wilayah terdampak konflik. Selama kunjungan ke Provinsi Pattani, delegasi Nahdlatul Ulama bertemu dengan tokoh masyarakat muslim Patani dan pejabat keamanan Thailand di Thailand Selatan. Dalam pertemuan dengan pihak pemimpin Thailand, seperti Raja Bhumibol Adulyadej, Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, Menteri Luar Negeri Kanthati Suphamongkhon, dan pemimpin agama Buddha Thailand Somdej Phra Buddhacharya, K.H. A. Hasyim Muzadi mengawali pembicaranya dengan menjelaskan hakikat Islam sebagai agama rahmatan lil alamin (pemberi kasih sayang untuk seluruh alam). Dalam konteks ini, Islam pada hakikatnya adalah agama perdamaian yang memberikan damai kepada setiap orang.

Hambatan-Hambatan Diplomasi

Hambatan yang terjadi bila dilihat terdapat pada pemerintah Thailand yang menolak dan tidak melaksanakan resolusi konflik yang telah diajukan oleh Nahdlatul Ulama. Setelah mengidentifikasi melihat sejarah pada tahun yang sama ternyata terdapat 2 penyebab pemerintah menolak atau tidak melaksanakan resolusi konflik yang diajukan yakni:

1. Pemerintah Thailand disibukkan oleh masalah internal pemerintahan sendiri sehingga melemahkan posisi pemerintah dan melupakan penyelesaian berbagai masalah konflik Patani.
2. Masih banyaknya tindakan pemberontakan sebelum dan sesudah dilakukannya diplomasi oleh Nahdlatul Ulama yang menyebabkan sulitnya komunikasi antara pemerintah dan muslim Patani.

Upaya PBNU Dalam Mengatasi Hambatan Diplomasi

Dengan demikian untuk mengatasi hambatan diplomasi tersebut Nahdlatul Ulama tidak memaksakan kehendak melainkan merubah strategi dengan memberikan beasiswa dan pengiriman guru sebagai upaya NU membantu persoalan pendidikan dan

ekonomi di Thailand selatan. Walaupun perdamaian belum sepenuhnya terjadi namun setidaknya ada perubahan sikap dari pemerintah Thailand dalam menangani konflik ini secara .

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa konflik Muslim Patani merupakan sebuah persoalan yang sangat kompleks dimana banyak yang berpandangan bahwa ini merupakan konflik sosio-Ekonomi dimana suku, agama, ras serta kesenjangan terdapat di dalamnya. Untuk mencari jalan keluarnya Pemerintahan Thailand meminta bantuan Internasional termasuk pada NU dan mengundang langsung datang ke Thailand untuk menyelesaikan konflik. Dalam diplomasi NU melakukan berbagai cara antara lain yakni dengan melakukan Pendekatan (*Aswaja*) kepada Masyarakat muslim Patani dan mangajukan Resolusi konflik kepada pemerintahan Thailand. Hambatan yang terjadi bila dilihat terdapat pada pemerintah Thailand yang menolak dan tidak melaksanakan resolusi konflik yang telah di ajukan oleh Nahdlatul Ulama. setelah mengidentifikasi melihat sejarah pada tahun yang sama ternyata terdapat 2 penyebab pemerintah menolak atau tidak melaksanakan resolusi konflik Dengan demikian untuk mengatasi hambatan diplomasi tersebut Nahdlatul Ulama tidak memaksakan kehendak melainkan merubah strategi dengan memberikan beasiswa dan pengiriman guru sebagai upaya NU membantu persoalan pendidikan dan ekonomi di Thailand selatan. Walaupun perdamaian belum sepenuhnya terjadi namun setidaknya ada perubahan sikap dari pemerintah Thailand dalam menangani konflik ini secara damai.

Referensi

Amin, A. A. W. (2018). Diplomasi Publik Indonesia Melalui Bidang Pendidikan Dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Thailand ; Studi Kasus Mahasiswa.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42803/2/AQIL>

AULIA WAFDA AMIN-FISIP.pdf

Dr.Arif Saiman, M. A. (2022). DIPLOMASI SANTRI.

https://www.google.co.id/books/edition/Diplomasi_Santri/CEaFEAAAQBAJ?hl=id

&g bpv=1&dq=DIPLOMASI+SANTRI&pg=PR26&printsec=frontcover
KHAIRI, W. Y. A. B. W. Y. (2017). WAN YUNIL AMRI BIN WAN YUNIL

KHAIRI. 1–14. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1694/1/Wan_Yunil_Bin_Wan_Yunil_Khairi.pdf

Muzadi, H. A. H. (2006). Islam Moderat dan Penanganan Konflik Thailand Selatan. NU CHANNEL. <https://www.nu.or.id/opini/islam-moderat-dan-penanganan-konflik-thailand-selatan-ca7pj>

Pramudita, G., Fasisaka, I., & Kawatri Resen, P. (2015). Tindakan Pemerintah Thailand Dalam Merespons Gerakan Etnonasionalisme di Thailand Selatan Tahun 2004 ?? 2006. Jurnal Hubungan Internasional, 1(03), 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/14082/9718>

Ramadhan, T. (2021). Hikayat Pattani dan Eksistensi Masjid di Negeri Pagoda: Umat Islam Thailand dalam Pusaran Harmoni dan Konflik. Journal of Islamic Civilization, 3(2), 149–159. <https://doi.org/10.33086/jic.v3i2.2619>

Reachtoteachrecruiting.com. (2022). Religion in Thailand. Reachtoteachrecruiting.Com. <https://www.reachtoteachrecruiting.com/guides/guide-to-thailand-home/religion-in-thailand/>

Sari, D. N. (2019). Resolusi Konflik Kelompok Separatis Muslim Di Thailand Selatan. Jurnal UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL.

Suaedy, A. (2012). Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai.